



Pusat Kajian Iklim Usaha
dan Rantai Nilai Global
LPEM FEB UI

Mohamad D. Revindo, Ph.D
revindo@lpem-feui.org

Teuku Riefky, M.Sc.
teuku.riefky@lpem-feui.org

Cania A. Sinaga, S.E
caniaadinda@lpem-feui.org



Laporan bulanan

Trade and Industry Brief

didistribusikan secara
gratis, dan dapat diunduh
di website LPEM FEB UI
<https://www.lpem.org/>
atau dengan memindai
QR code ini.

Untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha, pada awal Agustus lalu pemerintah Indonesia meluncurkan *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko atau *risk-based approach* (RBA), yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari UU no.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan OSS-RBA ini maka usaha dengan resiko bahaya yang lebih rendah akan melalui proses dan syarat perizinan yang lebih sederhana dan ringan pula, demikian pula sebaliknya. OSS-RBA ini diharapkan akan memperbaiki iklim usaha di Indonesia, tentunya jika terdapat konsistensi pada tingkat implementasinya. *Trade and Industry Brief* bulan ini membahas secara singkat parameter tingkat risiko, penyelenggaraan perizinan untuk masing-masing tingkat risiko, serta pekerjaan rumah yang masih perlu diperhatikan.

Trade and Industry Brief bulan ini juga melihat perkembangan neraca perdagangan Indonesia per akhir Juli 2021 lalu, yang kembali mencatat surplus cukup besar senilai USD2,59 miliar dollar, yang merupakan surplus ke-15 berturut-turut sepanjang 2020-2021. Informasi yang digunakan dalam *brief* ini diperoleh dari Berita Resmi Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, *ITC Trademap*, dan berbagai sumber lainnya.

A. Topik Khusus Agustus: Peluncuran *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko atau *risk-based approach* (RBA)

Pada awal Agustus lalu, Presiden Joko Widodo melakukan peresmian peluncuran *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko atau *risk-based approach* (RBA) untuk perizinan berusaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan bentuk pelaksanaan dari UU no.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Sistem pengelompokan risiko dalam OSS-RBA menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 pada level 5 digit dengan total 1.790 KBLI. Tingkat risiko dari pelaku usaha yang mengajukan izin dibagi

menjadi empat jenis tingkat risiko yaitu Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi [1].

Parameter yang digunakan untuk analisis risiko adalah penilaian tingkat bahaya; penilaian potensi terjadinya bahaya; penetapan tingkat risiko dan skala usaha. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan; keselamatan; lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya [2].

Dari parameter tersebut, jenis pelaku usaha diklasifikasikan ke dalam empat jenis risiko yang memiliki perbedaan

dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha seperti berikut [3]:

1. **Rendah:** Hanya wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas pelaku usaha sekaligus berlaku sebagai izin usaha, dan dapat berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau jaminan halal.
2. **Menengah-Rendah:** Pelaku Usaha wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan bukti legalitas pelaku usaha telah memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. Sertifikat standar ini diperoleh melalui lembaga Online Single Submission (OSS).
3. **Menengah Tinggi:** Pelaku Usaha wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar. Perbedaan dengan risiko Menengah-Tinggi adalah pada pihak yang memberikan izin persetujuan, yakni pemerintah pusat atau daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha, meskipun pendaftarannya tetap melalui OSS
4. **Tinggi:** Pelaku Usaha wajib memiliki NIB dan Izin. Izin diberikan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk perizinan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional, termasuk dalam hal Kelayakan Lingkungan Hidup.

Secara garis besar, OSS RBA ini ditujukan untuk mempermudah perizinan berusaha yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan dunia

usaha. Berdasarkan index *Ease of Doing Business* yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia secara keseluruhan menempati peringkat 73 dari 190 negara. Khusus untuk indikator '*starting a business*', Indonesia terbilang memiliki peringkat yang buruk, yaitu peringkat 140 dari 190 negara [4].

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi sulitnya perizinan berusaha di Indonesia mencakup rumitnya birokrasi perizinan, hadirnya *middlemen* atau calo dalam proses perizinan, dan mahalannya proses perizinan. OSS RBA berusaha menyelesaikan beberapa masalah utama ini dengan mengimplementasikan sistem yang mudah dipahami oleh masyarakat umum (*user-friendly*), sistem yang transparan dan dapat diakses oleh semua orang, serta ditanggungnya beberapa biaya dokumen perizinan seperti SNI dan Sertifikasi Halal. Optimalisasi dan efisiensi permohonan perizinan usaha diharapkan hadir karena operasi *remote solution* dari *link net* pada OSS-RAB dapat memangkas birokrasi operasional bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari eksplorasi hingga distribusi melalui aplikasi sistemik yang terhubung ke internet [5].

Sistem OSS RAB yang merupakan pengembangan dari sistem OSS sebelumnya, atau yang disebut juga dengan OSS versi 1.1, memiliki beberapa perbedaan utama [6]. Pertama, Sistem OSS versi 1.1 masih bersifat desentralisasi dalam *clouding computing*, sedangkan dalam OSS-RBA sudah menerapkan sistem terpusat untuk 16 sektor usaha. Kedua, terkait standar

perizinan berusaha yang belum ada pada OSS versi 1.1, diperlengkapi dengan Norma Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada OSS-RBA sebagai acuan tunggal perizinan usaha. Ketiga, belum adanya klasifikasi berdasarkan risiko pada versi 1.1 dalam segala kegiatan usaha, OSS-RBA memfasilitasi metode penentuan klasifikasi usaha berdasarkan risiko. Keempat, OSS-RBA menerapkan standar waktu pengurusan dalam segala hal perizinan, hal ini diharapkan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha.

Selain menangkal beberapa permasalahan utama dalam proses perizinan berusaha, sistem yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah sejak bulan Maret 2021 ini juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang bertambah akibat dampak Pandemi COVID-19 [7]. Pemangkasan aturan yang menghambat berkembangnya usaha dilakukan agar iklim usaha di Indonesia semakin kondusif dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, yang pada akhirnya membantu Indonesia untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand [8].

Penghapusan birokrasi juga akan memudahkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memulai usaha. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan dengan hadirnya OSS-RBA ini diharapkan menjadi akselerator pencapaian target investasi di angka 900 triliun di kuartal 3 2021 [9]. Sejalan dengan target tersebut, sistem ini dirancang agar semua pelaku

usaha terlebih untuk pelaku UKM dapat meningkatkan produksinya yang sering terhambat dalam proses perizinan akibat masih adanya birokrasi yang merumitkan pelaku usaha yang harus mengurus perizinan dari awal di kantor kepala daerah masing-masing hingga ke kementerian.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sistem OSS RBA, beberapa aspek perlu difokuskan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi manfaat dari OSS RBA. Pertama, sosialisasi yang luas dan inklusif perlu terus digencarkan pemerintah agar pelaku bisnis, terutama di daerah tertinggal yang memiliki akses informasi dan keterampilan menggunakan perangkat teknologi yang terbatas.

Kedua, penggunaan dan pemeliharaan sistem dan infrastruktur digital OSS RBA yang berkualitas. Salah satu permasalahan utama yang umum dijumpai oleh pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS versi sebelumnya adalah infrastruktur digital dalam platform OSS seringkali tidak responsif dan proses mengurus perizinan berusaha bisa memakan waktu berhari-hari akibat lambatnya sistem infrastruktur digital sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dan keinginan penggunaan sistem ini oleh dunia usaha. Hambatan ini perlu dibenahi dalam platform OSS RBA.

Ketiga, platform OSS RBA masih mengandalkan akses internet dan ketersediaan perangkat digital (Laptop, Handphone, Tablet) dalam penggunaannya. Faktanya, beberapa daerah di Indonesia masih memiliki akses

listrik dan internet yang terbatas. Dalam hal ini pemerintah perlu mendorong ketersediaan akses listrik dan internet secara lebih luas untuk mengoptimalkan jangkauan dari OSS RBA.

[1] [OSS.go.id](https://oss.go.id),
<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

[2] [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com),
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6033347523f05/melihat-poin-penting-pp-izin-usaha-berbasis-risiko?page=2>

[3] smartlegal.id,
<https://smartlegal.id/perizinan/2021/03/03/pp-5-2021-terbit-perizinan-usaha-dibagi-berdasarkan-risiko/>

[4] [doingbusiness.org](https://www.doingbusiness.org),
<https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>

[5] [Presiden Republik Indonesia \(RI\)](https://www.presidentri.go.id),
<https://www.presidentri.go.id/siaran->

[pers/president-jokowi-resmikan-peluncuran-oss-berbasis-risiko/#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20meresmikan%20peluncuran,Modal%20\(BKPM\)%2C%20Jakarta](https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-resmikan-peluncuran-oss-berbasis-risiko/#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20meresmikan%20peluncuran,Modal%20(BKPM)%2C%20Jakarta)

[6] [Liputan6.com](https://www.liputan6.com),
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4629997/ini-bedanya-oss-versi-11-dengan-oss-berbasis-risiko>

[7] [OSS.go.id](https://oss.go.id),
<https://oss.go.id/baca/artikel?id=49&title=Bahlil%20%3A%20Sistem%20OSS%20Berbasis%20Risiko%20Terus%20Dikembangkan>

[8] [Reuters.com](https://www.reuters.com),
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-launches-online-push-streamline-investment-permits-2021-08-09/>

[9] money.kompas.com,
<https://money.kompas.com/read/2021/08/12/123000926/ada-oss-bahlil-yakin-investasi-tetap-tembus-rp-900-triliun-tahun-ini>



B. Ringkasan Kinerja serta Prospek Perdagangan dan Industri

1. Neraca Perdagangan dan Harga Komoditas

Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2021 mencatat surplus cukup besar senilai USD2,59 miliar. Surplus ini sekaligus menyambung surplus neraca perdagangan pada Juli lalu yang juga cukup besar senilai USD1,32 miliar. Surplus Juli 2021 ini didorong oleh surplus pada neraca nonmigas yang mencapai USD3,38 miliar, sementara neraca migas kembali mencatatkan defisit senilai USD0,79 miliar. Sebagai perbandingan, pada Juli lalu neraca nonmigas mencatatkan defisit sebesar USD2,4 miliar sementara neraca migas mengalami defisit senilai USD1,07 miliar.

Secara kumulatif, sepanjang tujuh bulan pertama tahun 2021 neraca perdagangan Indonesia berada dalam keadaan surplus senilai USD14,42 miliar. Surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar USD20,91 miliar sepanjang Januari-Juli 2021 menutupi neraca perdagangan migas yang mengalami defisit sebesar USD6,58 miliar.

2. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Juli 2021 menunjukkan penurunan dibandingkan Juli. Nilai total ekspor Indonesia pada Juli

2021 tercatat USD17,70 miliar atau turun 4,53 persen dibanding Juli. Sebaliknya, jika dibandingkan Juli 2020, nilai ekspor Juli 2021 menunjukkan peningkatan yang sebesar 29,32 persen.

Komposisi ekspor sepanjang Januari-Juli 2021 sangat didominasi produk nonmigas (94,35 persen) dibandingkan migas (5,65 persen). Komoditas utama ekspor migas berasal dari pertambangan minyak mentah & gas, sedangkan hasil olahan minyak masih terbatas. Kontributor utama ekspor nonmigas adalah produk industri pengolahan (78,47 persen), disusul oleh pertambangan dan lainnya (14,02 persen), dan terakhir pertanian (1,86 persen).

Berdasarkan 10 kelompok produk utama ekspor, lima kontributor utama ekspor nonmigas sepanjang Januari-Juli 2021 terdiri dari: 1) HS 15: lemak dan minyak hewan/nabati (14,59 persen); 2) HS 72: besi dan baja (9,11 persen); 3) HS 85: mesin dan perlengkapan elektrik (5,68 persen); 4) HS 87: kendaraan dan bagiannya (4,34 persen); 5) HS 84: mesin dan peralatan mekanis (3,18 persen).

Negara yang menjadi tujuan ekspor utama produk nonmigas Indonesia selama Januari-Juli 2021 adalah

Tiongkok (21,85 persen dari total ekspor nonmigas). Negara tujuan ekspor utama berikutnya secara berturut-turut adalah Amerika Serikat (11,91 persen), Jepang (7,75 persen), India (5,69 persen), dan Malaysia (5,05 persen). Peran kelima negara tujuan utama tersebut mencapai 52,25 persen dari total nilai ekspor nonmigas, sedangkan kontribusi ekspor ke 13 negara tujuan utama selama Januari-Juli 2021 mencapai 71,79 persen.

Secara umum, porsi ekspor tujuan ekspor pada Juli 2021 terbesar yaitu ke Tiongkok sebesar USD3,56 miliar, Amerika Serikat berada di urutan kedua dengan USD2,02 miliar, disusul Jepang dengan USD1,12 miliar, yang dimana ketiga negara tersebut menyumbang 40,57 persen dari total. Sementara itu, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) meningkat USD3,18 miliar dan USD1,55 miliar, masing - masing.

Ditinjau dari provinsi asal, lima provinsi dengan sumbangan ekspor barang terbesar selama Januari-Juli 2021 adalah Jawa Barat (15,44 persen), Jawa Timur (10,72 persen), Kalimantan Timur (9,02 persen), Riau (8,80 persen) dan Kepulauan Riau (6,86 persen). Kelimanya menyumbangkan lebih dari setengah total nilai ekspor barang nasional.

3. Perkembangan Impor

Selama Juli 2021, nilai impor Indonesia tercatat USD15,11 miliar atau turun 12,23 persen dibanding Juni. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan Juli 2020 nilai

impor Juli 2021 meningkat sebesar 44,44 persen.

Kontributor utama impor selama Januari-Juli 2021 adalah produk nonmigas (87,47 persen), adapun impor migas menyumbang 12,53 persen yang berupa hasil olahan minyak bumi untuk bahan bakar dan bahan baku industri. Menurut penggunaannya, sebagian besar impor selama Januari-Juli 2021 digunakan untuk bahan baku dan penolong (75,84 persen), barang modal (14,35 persen) dan sebagian kecil untuk barang konsumsi langsung (9,81 persen) serta).

Secara lebih spesifik, lima kontributor utama impor nonmigas selama Januari-Juli 2021 adalah: 1) HS 84: mesin dan peralatan mekanis (14,50 persen); 2) HS 72: besi dan baja (6,78 persen); 3) HS 39: plastik dan barang dari plastik (6,18 persen); 4) HS 23: ampas/sisa industri makanan (2,70 persen); dan 5) HS 30: produk farmasi (1,94 persen). Komoditas impor tersebut umumnya adalah input penting di dalam proses produksi barang dan jasa domestik.

Sebagian besar impor nonmigas selama Januari-Juli 2021 didominasi oleh Tiongkok (32,00 persen). Negara asal utama impor berikutnya secara berturut-turut adalah Jepang (8,28 persen), Korea Selatan (5,47 persen), Singapura (5,45 persen), Thailand (5,29 persen).

Kelima negara tersebut menyumbangkan 56,49 persen nilai impor nonmigas, sedangkan kontribusi 13 negara asal impor utama mencapai 80,27 persen. Hal ini menunjukkan impor cenderung sangat terkonsentrasi dari beberapa negara mitra saja.



C. Ringkasan Angka Penting

Neraca perdagangan barang:

- ◆ Total: surplus USD2,59 miliar (Jul '21); surplus USD14,42 miliar (Jan-Jul '21)
- ◆ Migas: defisit USD0,79 miliar (Jul '21); defisit USD6,50 miliar (Jan-Jul '21)
- ◆ Nonmigas: surplus USD3,38 miliar (Jul'21); surplus USD20,92 miliar (Jan-Jul'21)

Pertumbuhan nilai ekspor:

- ◆ Total: -4,53% (Jul'21 *m-to-m*); 29,32% (Jul'21 *y-on-y*); 33,94% (Jan-Jul'21 *y-on-y*)
- ◆ Migas: -19,55% (Jul'21 *m-to-m*); 50,08% (Jul'21 *y-on-y*); 48,33% (Jan-Jul'21 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: -3,46% (Jul'21 *m-to-m*); 28,26% (Jul'21 *y-on-y*); 33,17% (Jan-Jul'21 *y-on-y*)

Komposisi nilai ekspor nonmigas Jan-Jul'21:

Industri Pengolahan (78,47%), Tambang dan Lainnya (14,02%), pertanian (1,86%)

Produk utama ekspor nonmigas Jan-Jul'21:

Lemak dan minyak hewan/nabati (14,59 persen); besi dan baja (9,11 persen); mesin dan perlengkapan elektrik (5,68 persen); kendaraan dan bagiannya (4,34 persen); berbagai produk kimia (3,15 persen).

Tujuan utama ekspor nonmigas Jan-Jul'21:

Tiongkok (21,35%), Amerika Serikat (12,08%), Jepang (7,14%), India (5,73%), Malaysia (0,78%)

Provinsi asal ekspor Jan-Jul'21:

Jawa Barat (15,44%), Jawa Timur (10,72%), Riau (8,86%), Kalimantan Timur (8,80%), Kepulauan Riau (6,86%)

Pertumbuhan nilai impor:

- ◆ Total: -12,22% (*m-to-m*); 44,44% (*y-on-y*); 30,46% (Jan-Jun '21 *y-on-y*)
- ◆ Migas: -22,28,44% (*m-to-m*); 86,39% (*y-on-y*); 56,74% (Jan-Jun '21 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: -10,67% (*m-to-m*); 40,21% (*y-on-y*); 27,40% (Jan-Jun '21 *y-on-y*)

Komposisi impor Jan-Jul'21:

- ◆ Berdasarkan penggunaan: barang konsumsi (9,81%), barang baku penolong (75,84%), barang modal (14,35%)
- ◆ Berdasarkan produk utama: Mesin dan peralatan mekanis (14,50 persen); besi dan baja (6,78); plastik dan barang dari plastik (6,18 persen); ampas/sisa industri makanan (2,70 persen); dan Produk Farmasi (1,94 persen).

Asal utama impor nonmigas Jan-Jul'21:

Tiongkok (33,10%), Jepang (8,84%), Amerika Serikat (5,59%), Australia (5,21%), Thailand (5,19%) .